



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1308, 2015

KEMENKEU. Pengamanan. Impor. *Coated Paper*.  
*Paper Board*. Bea Masuk. Pengenaan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 165/PMK.010/2015  
TENTANG  
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP  
IMPOR PRODUK *COATED PAPER* DAN *PAPER BOARD*  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor, selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
- b. bahwa berdasarkan hasil akhir penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri diakibatkan karena terjadinya lonjakan jumlah impor produk coated paper dan paper board;
- c. bahwa sesuai hasil penyelidikan dimaksud, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah menyampaikan rekomendasi pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan kepada Menteri

Perdagangan, yaitu pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk coated paper dan paper board;

- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c Menteri Perdagangan melalui surat Nomor 470/M-DAG/SD/6/2015 tanggal 5 Juni 2015 dan surat Nomor 567/M-DAG/SD/7/2015 tanggal 13 Juli 2015 menyampaikan keputusan dan usulan penetapan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk coated paper dan paper board;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Coated Paper dan Paper Board;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Perdagangan Nomor 470/M-DAG/SD/6/2015 tanggal 5 Juni 2015 hal Permintaan Pertimbangan atas Rekomendasi KPPI tentang Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap Importasi Barang "Coated Paper dan Paper Board";
  2. Surat Menteri Perdagangan Nomor 567/M-DAG/SD/7/2015 tanggal 13 Juli 2015 hal Keputusan atas Hasil Akhir Penyelidikan Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap Barang Impor "*Coated Paper dan Paper Board*";
  3. Laporan Akhir Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tentang Hasil Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap Impor Produk Kertas dan Kertas Karton Dilapisi, Tidak Termasuk Kertas Uang, dengan Nomor Harmonized System (HS) 4810.111.00, 4810.119.00, 4810.191.90, 4810.199.90, 4810.14.11.00, 4810.14.19.00, 4810.14.91.90, 4810.14.99.90, 4810.19.11.00, 4810.19.19.90, 4810.19.91.90 dan 4810.19.99.90;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK *COATED PAPER* DAN *PAPER BOARD*.

Pasal 1

Terhadap impor produk coated paper dan paper board berupa kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, tidak diwarnai, tidak dihias atau tidak dicetak permukaannya dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak, atau keperluan grafik lainnya, atau dicetak, dari jenis yang digunakan untuk apparatus yang merekam sendiri, tidak termasuk kertas termo-sensitif, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, dalam keadaan tidak dilipat, dengan gramasi 80 (delapan puluh) gsm sampai dengan 400 (empat ratus) gsm, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik, atau mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) menurut berat keseluruhan kandungan seratnya, tidak termasuk cast coated paper, yang mencakup nomor Harmonized System (HS) ex.4810.13.11.00, ex.4810.13.19.00, ex.4810.13.91.90,

ex.4810.13.99.90, ex.4810.14.11.00, ex.4810.14.19.00, ex.4810.14.91.90, ex.4810.14.99.90, ex.4810.19.11.00, ex.4810.19.19.90, ex.4810.19.91.90, dan ex.4810.19.99.90 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

### Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Periode	Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Nilai Impor
1	Tahun Pertama, dengan Periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	9%
2	Tahun Kedua, dengan Periode 1 (satu) tahun setelah tanggal berakhirnya Tahun Pertama.	7%
3	Tahun Ketiga, dengan Periode 1 (satu) tahun setelah tanggal berakhirnya Tahun Kedua.	5%

### Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk coated paper dan paper board yang berasal dari negara-negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
  - a. Tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*); atau
  - b. Tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan

Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation).

#### Pasal 5

Terhadap impor produk coated paper dan paper board yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin).

#### Pasal 6

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

- (1) Peraturan Menteri ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2015  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR165 /PMK. 010/2015  
 TENTANG  
 PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN  
 TERHADAP IMPOR PRODUK *COATED PAPER* DAN *PAPER BOARD*

DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN  
 BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK  
*COATED PAPER* DAN *PAPER BOARD*

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Albania	34.	El Salvador
2.	Angola	35.	Fiji
3.	Antigua and Barbuda	36.	Gabon
4.	Argentina	37.	The Gambia
5.	Armenia	38.	Georgia
6.	Bahrain, Kingdom of	39.	Ghana
7.	Bangladesh	40.	Grenada
8.	Barbados	41.	Guatemala
9.	Belize	42.	Guinea
10.	Benin	43.	Guinea-Bissau
11.	Bolivia, Plurinational State of	44.	Guyana
12.	Botswana	45.	Haiti
13.	Brazil	46.	Honduras
14.	Brunei Darussalam	47.	India
15.	Burkina Faso	48.	Indonesia (Batam)
16.	Burundi	49.	Israel
17.	Cabo Verde	50.	Jamaica
18.	Cambodia	51.	Jordan
19.	Cameroon	52.	Kenya
20.	Central African Republic	53.	Kuwait, the State of
21.	Chad	54.	Kyrgyz Republic
22.	Chile	55.	Lao People's Democratic Republic
23.	Colombia	56.	Lesotho
24.	Congo	57.	Liechtenstein
25.	Costa Rica	58.	Macao, China
26.	Cote d'Ivoire	59.	Madagascar
27.	Cuba	60.	Malawi
28.	Democratic Republic of the Congo	61.	Malaysia
29.	Djibouti	62.	Maldives
30.	Dominica	63.	Mali
31.	Dominican Republic	64.	Mauritania
32.	Ecuador	65.	Mauritius
33.	Egypt	66.	Mexico

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
67.	Moldova, Republic of	94.	Sierra Leone
68.	Mongolia	95.	Solomon Islands
69.	Montenegro	96.	South Africa
70.	Morocco	97.	Sri Lanka
71.	Mozambique	98.	Suriname
72.	Myanmar	99.	Swaziland
73.	Namibia	100.	Chinese Taipei
74.	Nepal	101.	Tajikistan
75.	Nicaragua	102.	Tanzania
76.	Niger	103.	Thailand
77.	Nigeria	104.	The Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
78.	Oman	105.	Togo
79.	Pakistan	106.	Tonga
80.	Panama	107.	Trinidad and Tobago
81.	Papua New Guinea	108.	Tunisia
82.	Paraguay	109.	Turkey
83.	Peru	110.	Uganda
84.	Philippines	111.	Ukraine
85.	Qatar	112.	United Arab Emirates
86.	Russian Federation	113.	Uruguay
87.	Rwanda	114.	Vanuatu
88.	Saint Kitts and Nevis	115.	Venezuela, Bolivarian Republic of
89.	Saint Lucia	116.	Viet Nam
90.	Saint Vincent and the Grenadines	117.	Yemen
91.	Samoa	118.	Zambia
92.	Saudi Arabia, Kingdom of	119.	Zimbabwe
93.	Senegal		

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO